

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keuangan daerah di Indonesia pada saat ini merupakan hasil perkembangan sistem pasca reformasi. Dalam perpektif akuntansi khususnya, reformasi sudah mulai menguat yaitu dengan dilakukannya penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada sektor publik. Selain itu, adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pada sistem akuntansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mardiasmo (2006) mengartikan akuntabilitas publik sebagai pengungkapan dan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah daerah kepada pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Perkembangan akuntansi yang pesat tidak hanya memberi manfaat dalam praktiknya tetapi juga membawa masalah yaitu adanya praktik kecurangan (*fraud*). Menurut Wells (2007) *accounting fraud* merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan agar menyesatkan bagi pengguna laporan akuntansi dan tindakan tersebut menggunakan motif negatif untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu. Sedangkan menurut ACFE (*Association Of Certified Fraud Examiners*) terdapat tiga golongan jenis kecurangan akuntansi yaitu: (1) adanya kecurangan dalam laporan keuangan, (2) penyalahgunaan aktiva dan (3) adanya kasus korupsi. kecurangan akuntansi pada umumnya berkaitan dengan tindakan korupsi (sumber: acfe.com). Shleifer dan Vishny

(1993) menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat korupsi suatu negara.

Anjuran untuk menegakkan kejujuran atau anjuran untuk menghindari perilaku kecurangan dijelaskan dalam QS An-nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. Annisa: 58)”

ICW (*Indonesian Corruption Watch*) menyatakan bahwa penindakan kasus korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 6,5 triliun dimana hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 sejumlah 94 kasus korupsi dan kenaikan nilai kerugian sebesar Rp 820 miliar (sumber: icw.or.id, 2017). Sektor yang paling banyak dikorupsi dalam pengadaan barang dan jasa ialah terkait dengan pelayanan publik dan kasus korupsi yang menduduki peringkat satu berdasarkan lembaga ada pada pemerintah daerah yaitu terdapat 222 kasus dengan jumlah nilai kerugian negara Rp 1,17 triliun dan jumlah tersangka sebanyak 326. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum keluar dari kondisi kasus korupsi khususnya terkait dengan pelayanan publik pada lembaga pemerintah daerah. *Corruption Perception Index* (CPI) menyatakan bahwa pada tahun 2017 negara Indonesia dipersepsikan sangat korup. Rentang indeks CPI adalah 0-100 dimana skor 0 dipersepsikan sebagai negara sangat korup sementara skor 100 bersih dari korupsi. Indonesia memperoleh skor

37 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei (sumber: riset.ti.or.id). Skor 37 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum keluar dari persepsi negara sangat korup. Berdasarkan kasus tersebut sudah seharusnya pemerintah melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan melaporkan laporan keuangan dan pengelolaan aktivitas keuangan pada institusi pemerintah.

Fraud Triangle Theory merupakan teori yang mendasar untuk menjelaskan penyebab dilakukannya penipuan (Abdullahi dan Mansor, 2015). Teori tersebut terdiri dari tiga elemen yang diperlukan untuk terjadinya penipuan: *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Oleh karena itu harus ada tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan (*fraud*) dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut. Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki peluang untuk melakukan *fraud*. Menurut Albrecht (2014) kesempatan merupakan sebuah kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan, dimana kondisi tersebut dianggap aman oleh pelaku dan beranggapan bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi. Namun, tindakan kecurangan tersebut sebenarnya dapat diantisipasi oleh pemerintah yaitu dengan adanya penegakkan hukum dan keefektifan sistem pengendalian internal.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan

yaitu (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku (Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319). Kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila seseorang melihat adanya kesempatan atas lemahnya pengendalian internal (Wilopo, 2006). Penulis berpendapat apabila sistem pengendalian internal suatu entitas baik dan mampu dilaksanakan dengan baik maka pengendalian internal mampu mengatasi terjadinya *fraud*. Berdasarkan hasil atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017, Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terdapat temuan atas permasalahan pengendalian internal yang semakin lemah dari tahun 2017 ke 2018 yaitu sejumlah 7.284 meningkat menjadi 7.539 kasus (sumber : bpk.go.id, 2017 dan bpk.go.id, 2018). Temuan BPK atas kasus tersebut ada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dan badan lainnya. Namun, hasil temuan terbanyak terdapat pada pemerintah daerah.

Tabel 1. 1
Temuan Jumlah Permasalahan SPI Semester I, Tahun 2017 dan 2018

Semester/Tahun	Jumlah Permasalahan SPI			
	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN dan Badan Lainnya	Total
I/2017	983	6.053	248	7.284
I/2018	998	6.222	319	7.539

(Sumber: bpk.go.id)

Coram., dkk (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa entitas yang memiliki sistem pengendalian internal lebih cenderung mendeteksi dan melaporkan sendiri terhadap kecurangan daripada entitas yang tidak memiliki sitem pengendalian internal. Setiawan dan Helmayunita (2017)

dalam penelitiannya menyatakan sistem pengendalian internal organisasi dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam konteks perusahaan atau organisasi, dengan adanya pengendalian internal dapat menjamin bahwa aset perusahaan lebih terjaga dibandingkan dengan tidak adanya pengendalian internal (Mulia., dkk, 2017). Srivastava., dkk (2009) berpendapat bahwa ketika tekanan terjadi secara ekstrem maka penipuan atau kecurangan tidak dapat terjadi kecuali jika ada kesempatan.

Elemen kedua dalam *fraud triangle theory* yaitu *pressure* (tekanan). Tekanan ada dua yaitu tekanan finansial dan tekanan non finansial. Tekanan yang sering dikaitkan dengan tindakan kecurangan akuntansi yaitu tekanan finansial dimana seseorang sedang mengalami permasalahan dalam perekonomiannya. Menurut Tuanakotta (2010) tekanan finansial dipicu oleh kebutuhan akan uang dan gaya hidup berlebihan. Dengan adanya tekanan finansial tersebut menjadikan seseorang untuk berbuat kejahatan seperti penggelapan uang. Tekanan finansial dapat mempengaruhi kecenderungan individu dalam melakukan tindakan kecurangan akuntansi (Setiawan dan Helmayunita, 2017).

Elemen terakhir dalam *fraud triangle theory* yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Pembenaran ini bisa terjadi saat pelaku ingin membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih (posisi, gaji, promosi) karena telah lama mengabdikan pada perusahaan, atau pelaku

mengambil sebagian keuntungan karena perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar (Skousen dkk., 2009). Keterkaitan antara integritas manajemen dengan risiko audit seperti yang diungkapkan (Lou & Wang, 2011) memiliki hubungan terbalik. Manajemen yang memiliki integritas tinggi akan berdampak pada kecilnya risiko audit. Jika integritas yang dimiliki manajemen rendah maka risiko audit yang ditimbulkan akan besar. Semakin kecil integritas manajemen maka semakin besar pula tingkat rasionalisasi yang dimiliki manajemen. Hasil penelitian Lou dan Wang, (2011) mendukung konsep *fraud triangle theory* bahwa ketiga faktor risiko kecurangan yaitu salah satunya rasionalisasi berhasil dibuktikan memiliki hubungan dengan kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan akuntansi terjadi karena adanya faktor individu untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan. Faktor yang menyebabkan individu untuk melakukan tindakan kecurangan salah satunya yaitu kesesuaian kompensasi (Thoyibatun, 2009). Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa terdapat sejumlah 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti adanya korupsi (sumber : Kompas.com). Korupsi tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan atas tunjangan gaji yang diterima oleh ASN sehingga mendorong mereka mencari cara lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan yaitu dengan melakukan tindakan penyimpangan.

Definisi kesesuaian kompensasi menurut Virmayani (2017) adalah kecocokan dan kepuasan yang diterima oleh karyawan dari organisasi atau

instansi berupa upah perjam maupun gaji secara periodik sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian kesesuaian kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai bentuk imbalan atau pengganti kontribusi atas jasa mereka yang telah dilaksanakan kepada organisasi baik berupa uang maupun barang langsung atau tidak langsung. Putri dan Sari (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi yang tidak sesuai mendorong individu untuk melakukan kecurangan akuntansi. Abdullah (2006) dan Erickson dkk (2006) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa sistem kompensasi dapat digunakan sebagai alternatif untuk menurunkan kecurangan akuntansi, atau untuk meningkatkan kinerja dan kesadaran untuk mencapai kinerja. Hasil temuan tersebut didukung oleh Thoyibatun (2009) dan Virmayani (2017) yang menjelaskan bahwa untuk mengurangi terjadinya kecurangan, perusahaan dapat menerapkan sistem kompensasi. Hasil penelitian berbeda Dallas (2002) yang menjelaskan bahwa apabila sistem kompensasi hanya didasarkan atas kinerja fisik yang secara langsung diukur dengan satuan uang saja maka akan mendorong perilaku tidak etis. Hasil temuan tersebut didukung Wilopo (2006) dan Ahriati, dkk (2015), yang menemukan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan individu melakukan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Setiawan dan Helmayunita (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Pengendalian Internal, Tekanan Finansial dan Moralitas Individu” dengan desain

penelitian eksperimen pada konteks pemerintahan daerah. Responden dalam penelitian tersebut adalah mahasiswa akuntansi UNP semester 7 keatas yang di proksikan sebagai manajer pada sektor pemerintahan daerah. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu pengendalian internal, tekanan finansial, dan kesesuaian kompensasi. Variabel kesesuaian kompensasi dipilih karena adanya gap penelitian terdahulu. Hasil penelitian Putri dan Sari (2019), Thoyibatun (2009), Virmayani, (2017) menjelaskan bahwa adanya kesesuaian kompensasi yang diterima pegawai maka dapat mengurangi terjadinya kecurangan akuntansi sedangkan hasil penelitian Wilopo (2006) dan Ahriati dkk., (2015) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap tindakan individu melakukan kecurangan akuntansi. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu tersebut variabel kesesuaian kompensasi menggunakan data sekunder dan data primer dengan instrumen berbasis kuesioner. Kelemahan dari penggunaan kuesioner adalah munculnya bias sehingga tidak memperlihatkan perilaku sesungguhnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan desain eksperimen karena lebih menunjukkan perilaku sesungguhnya dibandingkan dengan desain non-eksperimental.

Tujuan dilakukannya penelitian ini karena masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya pada pemerintahan daerah dan berdasarkan hasil tren korupsi versi ICW bahwa sektor pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah masih menduduki peringkat satu terjadinya tindakan korupsi. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Tekanan Finansial, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Akuntansi”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengendalian internal akan memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah tekanan finansial akan memengaruhi individu untuk melakukan kecurangan akuntansi?
3. Apakah individu yang mengalami tekanan finansial dan berada pada kondisi tidak terdapat pengendalian internal cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan terdapat pengendalian internal?
4. Apakah kesesuaian kompensasi akan memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi?
5. Apakah individu dengan kompensasi yang tidak sesuai dan berada pada kondisi tidak terdapat pengendalian internal cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan terdapat pengendalian internal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah pengendalian internal yang baik akan memengaruhi seseorang dalam tindakan kecurangan akuntansi.

2. Untuk menganalisis apakah tekanan finansial yang dialami seseorang akan memengaruhi kecurangan akuntansi.
3. Untuk menganalisis apakah individu yang mengalami tekanan finansial dan berada pada kondisi tidak terdapat pengendalian internal cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan terdapat pengendalian internal.
4. Untuk menganalisis apakah pemberian kompensasi yang sesuai akan memengaruhi seseorang dalam tindakan kecurangan akuntansi.
5. Apakah individu dengan kompensasi yang tidak sesuai dan berada pada kondisi tidak terdapat pengendalian internal cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan terdapat pengendalian internal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi entitas-entitas yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti dapat memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang memengaruhi seseorang melakukan kecurangan, kemudian untuk meminimalisir terjadinya *fraud* ketika diterapkan pada suatu organisasi. Bagi akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan faktor yang memengaruhi kecurangan akuntansi.